

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- A. Hamid S. Attamimi, 1991, *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*.
- Asep Warlan Yusuf, 2008, *Silabus Hukum Administrasi Negara (HAN) Diklatpim*, Bandung, LAN.
- Bambang Sunggono, 2001, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Budiman Rusli, 2013, *Kebijakan Publik “Membangunan Pelayanan Publik Yang Responsif”*, Bandung, Hakim Publishing.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- Esti Ningrum, 2017, *Disertasi : Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Demokratis Yang Berbasis Nilai Keadilan*, Semarang, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
- Esmi Warassih P, 2014, *Resume Sosiologi Hukum (Bahan Ajar Pascasarjana Unswagati Cirebon)*, Cirebon, Unswagati.

- Hasan Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta, PT. Balai Pustaka.
- Jaya Dinany Al Butuni, 2017, *Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik: Peluang dan Tantangan*, Sebelas Maret University, Pasca Sarjana, Graduate Student.
- Jujur S. Suriasumantri, 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Jakarta, Gramedia.
- Maria S. W. Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta, Gramedia.
- Mukti Fajar ND dan Yuianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Notonegoro, 1974, *Pancasila Dasar Falsafat Negara*, Jakarta, Bhina Aksara.
- _____, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta, Pancuran Tujuh.
- Oding Djunaedi, 2009, *Esensi Manusia dalam Filsafat Pancasila Relevansinya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Cirebon, Syariah Fakultas Hukum Unswagati.
- Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Osborne, David dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Plume. New York
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.
- _____, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo.

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- _____, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta PT. Kompas.
- _____, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- _____, 2008, *Negera Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Press.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- _____, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sarwiji Suwandi, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta, Media Perkasa.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengertian Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- _____, 2002, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- _____, 2009, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam Sulistyowati Irinato & Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor, Indonesia.
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2009, *Ragam-ragam Penelitian Hukum, dalam Sulistyowati Irianto & Shidata (ed), Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya.

2. Peraturan Peundang-undangan

Pancasila.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAPP MPRS No.XX/MPRS/1966 (Jo. TAP MPR No. VMPPR/1973 dan TAP MPR No. IX/MR/1978 Jo. TAP MR No. 111/2000; dan 10) Sebagai Landasan Idiil; mengenai landasan GBHN.

Tap MPR No. III/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Selanjutnya UU KKN).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Pemanfaatan Uang Retribusi Perizinan Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintahan Kepada Masyarakat.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 Tentang SOTK DPMPTSP.

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala BPPT Kabupaten Kuningan.

3. Jurnal

Asep Kartiwa, 2006, Implementasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan “*Good Governance*”, Materi Lokakarya Peningkatan Peran Anggota DPRD, diselenggarakan oleh KPK, Jakarta, 7-8 Juni 2006.

Angkasa, 2010, Filsafat Hukum (Materi Kuliah), Magister Ilmu Hukum Hukum UNSOED, Perwokerto.

Liana Wahyu Choriah, Fakta Tentang Kelemahan Pelayanan Di Indonesia, 13 April 2015 • By Lianawahyuchoriah • In Pelayanan Publik.

Gagasan David Osborne dan Ted Gaebler : *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector* yang dipublikasikan pada tahun 1992 dan *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*, buku terakhir ini ditulis oleh David Osborne dan Peter Plastik yang dipublikasikan pada tahun 1997.

Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Notonegoro : pidato Dies Natalis Universitas Airlangga pada tanggal 10 November 1975.

Rfa 2309, Selasa, 24 Februari 2015, Kelemahan Pelayanan Publik di Indonesia.

Rudi Hartono, PNS, Ingin seperti padi : Semakin berisi semakin merunduk :

Kualitas Pelayanan Publik Instansi Pemerintah: “Buruk Muka, Cermin Dibelah” 16 Februari 2015 15:44 Diperbarui: 17 Juni 2015 11:06).

Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij, Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal Yang Kaya, dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta (ed), Ibid, hal. 191.

Satjipto Rahardjo, 02 Desember 2013, laporan dari Semarang : Menggali Karakter Hukum Progresif Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Satjipto Rahardjo menyebut *deep ecology*. Hukum tak semata untuk manusia.

Satjipto Rahardjo, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm 52.

Satjipto Rahardjo, 2009, (dalam I Gede A.B. Wiranata, Hukum Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasinya).

Utje Choeriah, 2014, Comparative Public Administration (Perbandingan Administrasi Negara) Critical Review, Unpad, Bandung.

4. Rujukan Elektronik

Pengertian Keadilan : Apa itu Keadilan? | Pengertian Ahli, www.pengertianahli.com › Pancasila dan Kewarganegaraan

Homebiologimatematikafisikaknsejarahbahasa Home » KN » Pengertian Keadilan Dan Macam-Macam Keadilan Pengertian Keadilan Dan Macam-Macam Keadilan

Tafsir Ayat Al-Qur'an Tentang Penegakan Amanah dan Keadilan (QS: Nahl) <https://ridhamujahidahulumuddin.wordpress.com>

Danuindras : keadilan menurut Pancasila, [radiosmasher.blogspot.com/ 2011/05/keadilan-menurut-pancasila.html](http://radiosmasher.blogspot.com/2011/05/keadilan-menurut-pancasila.html)

Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.421

detikNews / Berita / Detail Berita Follow detikcom, Senin 24 Juli 2017, 09:38 WIB, Pandangan MK soal Pancasila : Ideologi dan Cita Hukum Negara Andi Saputra – detikNews Sidang MK (ari/detikcom)

Wikipedia Indonesia

(<http://www.mampu.gov.my>,1993)